

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Di Era Reformasi Dalam Mencegah Berkembangnya Tindak Radikalisme

Oleh

Reda Wicaksono

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai implementasi nilai-nilai pancasila di era reformasi dalam mencegah berkembangnya tindakan radikalisme di Indonesia. Dengan maksud meningkatkan pemahaman akan implementasi nilai-nilai Pancasila di era reformasi yang dihadapkan pada aksi radikalisme yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk mencari metode implementasi nilai-nilai Pancasila oleh seluruh komponen bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencegah berkembangnya tindakan radikalisme.

PENDAHULUAN

a. Umum

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar, dan memiliki keanekaragaman yang luar biasa, pulaunya terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, namun ada satu yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain yaitu Ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila tidak lahir dalam ruang hampa, ideologi Pancasila lahir karena perasaan senasib sepenanggungan bangsa

Indonesia untuk merdeka. Sebagai ideologi nasional Pancasila menjadi pemersatu masyarakat Indonesia yang *Bhinneka Tunggal Ika*, dan sebagai arah dalam pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

Setelah era reformasi Pancasila seakan-akan kehilangan spiritnya, Pancasila terlanjur dimaknai sebagai ideologi tertutup, doktriner dan mengabaikan tuntutan perubahan, dan ideologi Pancasila dianggap sebagai produk rezim orde baru sehingga muncullah ketidakpercayaan kepada ideologi Pancasila. Situasi reformasi yang pada waktu itu menempatkan Indonesia dalam keadaan *anomie*, yakni terdapat kekosongan nilai serta mengalami amnesia sementara masyarakat Indonesia terhadap nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila, dan pasca reformasi yang notabene sedang dalam keadaan menuju *equilibrium* merupakan celah bagi ideologi-ideologi asing untuk menancapkan kukunya di Indonesia, beberapa diantaranya adalah ideology liberal, atau sekarang lebih dikenal dengan Neo-Liberalisme, yang menekankan fundamentalisme pasar, membuat Indonesia menjadi bertekuk lutut di hadapan kepentingan asing, serta ideologi Islam radikal atau lebih sering disebut dengan Fundamentalisme Islam.

Di antara kedua ideologi bercorak fundamen tersebut yang saat ini sangat nyata berpotensi untuk menghancurkan masyarakat adalah ideologi Islam radikal, karena ideologi tersebut sering berujung pada aksi teror yang berakibat fatal bagi keselamatan segenap rakyat Indonesia. Paham radikalisme Islam dapat terlihat dalam bentuk aksi teror di Indonesia, paham radikalisme menjadi “legitimasi ideologis” para pelaku teroris untuk melaksanakan aksinya. Beberapa kasus pengeboman seperti Bom Bali, Bom JW Marriot, Bom Ritz Carlton, Bom Cirebon sampai yang terakhir Bom Gereja di Solo semuanya terkait dengan individu dan kelompok yang menganut paham radikalisme. Menurut Wardlaw salah satu tujuan aksi teror adalah menghancurkan

solidaritas masyarakat, rasa kebersamaan, dan berusaha menciptakan rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang berkuasa.¹

Tidak hanya aksi teror, bentuk radikalisme Islam juga dapat dilihat dari organisasi-organisasi yang mencoba menyebarkan paham ajaran Islam secara kaku dan melakukan klaim kebenaran di atas kelompok lain, penyerangan terhadap Ahmadiyah, munculnya gerakan Negara Islam Indonesia (NII), serta kekerasan atas nama agama lainnya yang terjadi di Indonesia memperlihatkan secara jelas aksi radikal yang merusak tatanan hidup bangsa.

Radikalisme agama, eksistensinya menganggap dirinya sebagai ideologi alternatif yang hendak menggulingkan ideologi kekuasaan yang sedang *establish* (mapan),² dan atas nama Tuhan seseorang dapat melakukan aksi radikal dengan membunuh orang lain, kelompok tertentu, fasilitas milik publik, bahkan tempat sebagai bagian dari simbol-simbol politik dari satu kekuatan politik atau ideologi tertentu. Dengan dalih demi keagungan Tuhan, “menegakkan kebenaran”, “keadilan”, “mengubah sistem kafir” seseorang menjadi martir dalam bentuk tindakan berupa bom bunuh diri, *intifadah*, atau berbagai kegiatan lainnya yang ujung-ujungnya membunuh secara massal manusia yang tidak tahu duduk persoalan³. Jika dikaitkan dengan konteks Indonesia maka segala bentuk radikalisme merupakan ancaman terhadap ideologi Pancasila, sekaligus ancaman bagi keutuhan NKRI karena para pelaku aksi radikal seringkali bernaung di balik organisasi-organisasi radikal yang mempunyai motif ideologis, dan melaksanakan aksi radikalnya di tempat-tempat publik yang menjadi simbol kemapanan, fasilitas publik, maupun simbol dari golongan lain, seperti hotel, mesjid dan gereja.

¹ Wardlaw dalam Materi Kewaspadaan Nasional oleh Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan: *The Purpose of Terror is to divide the mass of society from the incumbent society, destroy solidarity, cooperation and interdependence.*

² Drs. A. Rubaidi, M.Ag. *Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama dan Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia.* Penerbit Logung Pustaka bekerjasama dengan LTNU PWNU Jawa Timur. Yogyakarta: 2008. Hlm. 34.

³ *Ibid.*

Pelaku aksi radikal sangat fanatik dengan keyakinannya, dan hampir semua merupakan Warga Negara Indonesia (WNI). Berkaca pada hal tersebut dapat diartikan bahwa tidak seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) belum memahami maupun mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Ideologi Pancasila sebagai ideologi, dasar negara maupun sebagai falsafah hidup bangsa. Oleh karena itu diperlukan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam mencegah berkembangnya tindakan radikalisme, agar bangsa Indonesia dapat berdaulat baik di luar maupun di dalam, serta dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

b. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Tulisan ini dalam rangka meningkatkan pemahaman akan implementasi nilai-nilai Pancasila di era reformasi dihadapkan pada aksi radikalisme yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Tujuan

Tulisan ini bertujuan untuk mencari metode implementasi nilai-nilai Pancasila oleh seluruh komponen bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencegah berkembangnya tindakan radikalisme.

c. Ruang Lingkup dan Tata Urut

1) Pendahuluan

a) Umum

b) Maksud dan Tujuan

- c) Ruang Lingkup dan Tata Urut
- d) Pengertian-Pengertian

2) Pembahasan

- a) Implementasi nilai-nilai Pancasila pada era reformasi di tengah ideologi-ideologi global.
- b) Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan radikalisme di Indonesia.
- c) Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam mencegah berkembangnya tindakan radikalisme di era reformasi.
- d) Alur Pikir Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Era Reformasi dalam Mencegah Berkembangnya Tindak Radikalisme

3) Penutup

- a) Kesimpulan
- b) Saran

d. Pengertian-Pengertian

1) Nilai-nilai Pancasila

Nilai-nilai Pancasila adalah kristalisasi dari budaya bangsa Indonesia yang diyakini mengandung kebenaran, ketepatan dan kemanfaatannya yang selanjutnya dijadikan dasar dan motivasi dalam segala sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.⁴

2) Radikalisme

Radikalisme adalah satu paham aliran yang menghendaki perubahan secara drastis dalam penjelasan lebih lanjut, aliran paham politik dimaksud menghendaki pengikutnya perubahan yang ekstrem sesuai dengan pengejawantahan paham mereka anut.⁵ Sementara itu radikalisme menurut pengertian lain adalah inti dari perubahan itu cenderung menggunakan kekerasan.⁶

3) *Anomie*

Emile Durkheim, sosiolog perintis Prancis abad ke-19 menggunakan kata ini dalam bukunya yang menuraikan sebab-sebab bunuh diri untuk menggambarkan keadaan atau kekacauan dalam diri individu, yang dicirikan oleh ketidakhadiran atau berkurangnya standar atau nilai-nilai, dan perasaan alienasi dan ketiadaan tujuan yang menyertainya. Anomie sangat umum terjadi apabila masyarakat sekitarnya mengalami perubahan-perubahan yang besar dalam situasi ekonomi, entah semakin baik atau semakin buruk, dan lebih umum lagi ketika ada kesenjangan besar antara teori-teori dan nilai-nilai ideologis yang umumnya diakui dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.⁷

4) Tujuan Nasional

Tujuan Nasional Negara Republik Indonesia, seperti dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ialah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Ikhtiar Baru 1995. http://www.cmm.or.id/cmm-ind_more.php?id=A674_0_3_0_M

⁶ Barry, Kamus Ilmiah Populer 1994. http://www.cmm.or.id/cmm-ind_more.php?id=A674_0_3_0_M

⁷ <http://id.wikipedia.org/wiki/Anomie>

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁸

PEMBAHASAN

a. Implementasi nilai-nilai Pancasila pada era reformasi di tengah pengaruh ideologi-ideologi global

Peristiwa tumbangnya rezim orde baru menandakan bahwa negara Indonesia mengalami masa transisi, peralihan dari sistem politik yang otoritarian ke sistem politik yang demokratis. Alam demokratisasi pada waktu itu mengizinkan seluruh kepentingan masyarakat dapat ditumpahkan ke dalam aspirasi dalam bentuk kebebasan yang seluas-luasnya, baik itu melalui organisasi masyarakat, partai politik, maupun gerakan sosial. Namun, di tengah euforia kebebasan beraspirasi tersebut menandakan suatu kondisi bahwa demokratisasi yang dijalankan pada era reformasi tersebut bersifat semu, dengan kata lain demokratisasi yang dialami bangsa Indonesia adalah demokratisasi yang tanpa arah dan tujuan. Hal tersebut dapat dilihat dari output reformasi yang ada saat ini adalah sistem politik yang menganut demokrasi secara prosedural⁹, belum secara substansial. Apa yang telah diamanatkan oleh Pancasila justru banyak yang dilanggar mulai dari sila pertama sampai sila kelima, termasuk pelanggaran-pelanggaran konstitusional dalam kehidupan riil masyarakat Indonesia sehingga tujuan nasional negara Indonesia hanya sebatas cita-cita di atas kertas, sedangkan kesejahteraan rakyat semakin sulit untuk tercapai.

⁸ Pendahuluan TAP MPR-RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.

⁹ Konsep Demokrasi Prosedural dikemukakan oleh Joseph Schumpeter dalam bukunya *Capitalism, Socialism and Democracy* tahun 1942. Schumpeter mengemukakan bahwa kehendak rakyat tidak bisa diimplementasikan begitu saja, perlu prosedur-prosedur sebagai pendorong, atau disebut dengan metode berdemokrasi.

Era reformasi pada kenyataannya menghidupkan kembali semangat egosentris kelompok-kelompok tertentu, baik itu sifatnya etnis kedaerahan maupun agama. Kepentingan masyarakat sebagai suatu bangsa menjadi terpecah-pecah, dan ujungnya ialah bangkitnya kelompok-kelompok radikal di Indonesia, khususnya kelompok radikal keagamaan. Yang terjadi di Indonesia kelompok radikal keagamaan justru melakukan praktek-praktek di luar prosedur, inkonstitusional, seperti melakukan aksi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok yang mengatasnamakan agama serta membawa simbol-simbol agama. Sebagai contoh serangkaian peristiwa pengrusakan tempat ibadah golongan Ahmadiyah, pengrusakan tempat-tempat hiburan oleh Front Pembela Islam (FPI), sampai aksi terorisme yang melibatkan organisasi Islam garis keras yaitu Jama'ah Islamiyah (JI).

Fenomena radikalisme tersebut muncul ketika era reformasi bergulir, dan organisasi-organisasi pengusung ideologi radikal relatif tidak mendapatkan tekanan yang berarti dari negara di era reformasi ketimbang di era orde baru yang otoritarian. Hal ini menandakan bahwa ada *missing link* atau sesuatu yang tak terungkap dari implementasi maupun sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang kelihatannya di era orde baru Pancasila selalu ditekankan sebagai asas tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena dalam kenyataannya pelaku tindak radikalisme justru dilakukan oleh Warga Negara Indonesia sendiri, bukan warga negara lain. Oleh sebab itu dapat dilihat bahwa sosialisasi maupun implementasi nilai-nilai Pancasila yang dilakukan selama ini tidak menyentuh alam pikiran seluruh masyarakat Indonesia, tidak semua warga negara Indonesia paham betul apa itu Pancasila, apa kegunaan Pancasila, apa tujuan Pancasila untuk kehidupan. Jika dibandingkan dengan agama, ideologi Pancasila akan sulit diterima oleh masyarakat awam sehingga agama dapat dengan mudah digunakan sebagai alat mobilisasi kognitif pelaku tindak radikalisme

karena agama tidak hanya menjanjikan kehidupan di dunia tetapi juga menawarkan “janji-janji” mutlak dari Tuhan akan kehidupan yang lebih baik di akhirat.

Implementasi nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan secara semu pada era orde baru menempatkan masyarakat Indonesia sebagai objek ideologi, gambaran sesungguhnya muncul ketika bangsa Indonesia memasuki era reformasi. Banyak warga negara Indonesia mulai memandang sebelah mata terhadap Pancasila, dan mata yang sebelah lainnya melirik dan mencari “ideologi alternatif” yang diyakini dapat mengembalikan kehidupannya ke dalam kesejahteraan. Bagi generasi tua yang sebagian besar hidup di era orde baru merasakan bahwa ideologi Pancasila yang diterapkan di zaman tersebut merupakan ideologi ideal, mapan dan mampu menciptakan kesejahteraan, namun bagi generasi muda bangsa Indonesia yang hidup dan mengalami pahitnya masa transisi yang ditandai dengan merajalelanya KKN, krisis ekonomi serta krisis multidimensi mendapatkan gambaran awal bahwa ideologi Pancasila tersosialisasikan sebagai ideologi yang rapuh, membawa Indonesia ke jurang krisis.

Kondisi krisis yang terjadi di Indonesia tahun 1998 menyebabkan bangsa ini mengalami keadaan *anomie*, yaitu kondisi dimana masyarakat mengalami transisi perubahan sosial politik dan seakan-akan kehilangan nilai-nilai yang selama ini dipegang, masyarakat menjadi kehilangan arah dan tujuan karena tidak ada arah yang jelas di situasi krisis tersebut. Keadaan *anomie* ini yang kemudian dimanfaatkan kepentingan-kepentingan asing untuk menanamkan nilai-nilai maupun ideologi baru pada masyarakat Indonesia, ideologi yang semuanya bertujuan untuk menciptakan pengaruh serta kekuasaan di seluruh belahan dunia (global). Kepentingan-kepentingan tersebut antara lain kepentingan pasar dengan ideologi Neo-Liberalisme, kepentingan kelompok klandestin dengan ideologi Neo-Sosialisme/Komunisme, dan kepentingan kelompok Islam radikal dengan ideologi

Fundamentalisme Islam. Ketiganya bergerak secara simultan baik melalui gerakan sosial melalui organisasi massa maupun gerakan politik melalui intervensi terhadap partai politik.

Subjek yang menjadi sasaran utama dari ketiga ideologi global tersebut adalah generasi muda, yang pada era reformasi dilihat sebagai agen yang berperan penting dalam proses perubahan sosial (*agent of change*). Generasi muda yang hidup dalam era reformasi dianggap mengalami situasi *anomie* sehingga tidak ada nilai-nilai Pancasila yang tertanam kuat di tiap pribadi generasi muda. Ideologi Neoliberalisme masuk ke generasi muda melalui kebebasan informasi serta budaya populer, ideologi Neo-Sosialisme/Komunisme masuk melalui gerakan sosial dengan ikon anti-kemapanan dan anti-pemerintah, ideologi Fundamentalisme Islam masuk melalui pembinaan keagamaan di sekolah-sekolah maupun kampus-kampus yang mengajak kembali ke Islam yang murni serta harus memperjuangkannya melalui gerakan politik demi terwujudnya negara yang Islami baik dengan bentuk negara Islam maupun kekhilafahan.

Dengan adanya kebebasan informasi yang didukung oleh kemajuan teknologi dan pasar bebas menciptakan suatu budaya kebarat-baratan (*westernisasi*) yang berpola hidup konsumtif, akibatnya segala produk yang berbau asing sangat diminati oleh generasi muda saat ini, dan produk dalam negeri mulai ditinggalkan. Informasi yang diterima generasi muda begitu banyak serta condong ke arah negatif, hal tersebut membuka peluang masuknya informasi tanpa filter yang berkecenderungan mengubah watak serta perilaku generasi muda. Akibatnya generasi muda tidak tahu lagi siapa dirinya, darimana dia berasal, dan pada akhirnya lupa akan sejarah bangsanya serta tercerabut dari nilai-nilai luhur Pancasila.

Kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan kepentingan lainnya yang melihat momentum setali tiga uang untuk menancapkan pengaruh ideologinya di Indonesia. Gerakan anti-

kemapanan yang ditunggangi ideologi Neo-Sosialisme/Komunisme mulai menggandrungi generasi muda dengan slogan-slogan anti-kapitalis, anti-neolib, dan berujung pada slogan anti pemerintahan yang berkuasa karena dianggap sebagai antek kapitalis neoliberal yang membawa masyarakat ke jurang kesengsaraan. Gerakan anti-kemapanan ini yang kemudian berusaha melakukan pendekatan ke elemen-elemen generasi muda sebagai motor penggerak aksi, dengan didukung oleh basis massa kaum miskin kota, buruh serta buruh tani. Basis massa tersebut dianggap sebagai representasi kemiskinan sebagai korban rezim berkuasa yang menyengsarakan rakyat, dan yang membahayakan, gerakan ini tidak menggunakan ideologi Pancasila sebagai solusi permasalahan bangsa, solusi yang didengung-dengungkan untuk mengatasi permasalahan bangsa adalah dengan cara menggulingkan rezim yang berkuasa melalui gerakan sosial politik revolusi.¹⁰

Selain kepentingan yang mengusung ideologi Neo-Liberalisme dan Neo-Sosialisme/Komunisme terdapat satu kepentingan yang saat ini menjadi ancaman serius terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Fundamentalisme Islam. Kaum fundamentalis melihat bahwa Indonesia sebagai negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia merupakan potensi strategis untuk mendukung terwujudnya kekhalifahan Islam, sebagai sarana dalam menegakkan syari'at Islam. Metode gerakannya sudah merambah di wilayah sosial maupun politik, dan seringkali membahayakan keselamatan rakyat Indonesia karena secara intensif melakukan aksi teror maupun penyerangan terhadap kelompok yang dianggap "kafir".

¹⁰ Gerakan ini termasuk gerakan yang radikal karena mencoba menerapkan kemurnian ajaran Karl Marx, yaitu untuk menciptakan masyarakat komunis tanpa kelas haruslah menggunakan metode revolusi sosial yaitu gerakan proletar melawan kaum borjuis, dalam konteks kehidupan bernegara saat ini kaum proletar direpresentasikan oleh kaum miskin kota, buruh (seluruh kaum pekerja yang tidak menguasai alat produksi) serta buruh tani, dan kaum borjuis direpresentasikan oleh pemerintah yang berkuasa yang menguasai alat-alat produksi.

Fundamentalisme Islam ini akhirnya menciptakan ideologi terorisme karena dalam mencapai tujuannya dilakukan melalui aksi terorisme seperti peledakan bom di tempat umum yang memakan korban jiwa cukup banyak. Dan kembali yang menjadi subjek sasaran sebagai pelaku terorisme adalah generasi muda. Generasi muda yang dianggap tidak lagi memiliki keterikatan kultural-historis terhadap nilai-nilai bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, karena besar di era reformasi serta mengalami dampak negatif dari reformasi yaitu minimnya kesempatan untuk hidup sejahtera, sehingga mengalami deprivasi relatif¹¹ yang memicu motivasi melakukan tindakan radikal terorisme. Tindakan radikal terorisme tersebut memberikan pengaruh yang luas karena diliput oleh media nasional maupun internasional, dengan harapan ideologi Fundamentalisme radikal tersebut mendapatkan simpati dunia sebagai antitesis dari ideologi Neo-Liberalisme yang mapan di dunia saat ini.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya tindak radikalisme di Indonesia

Menurut Daniel Bell dalam *The End of Ideology* pudarnya ikatan kelompok primer dalam komunitas lokal dan tergusurnya ikatan parokial mendorong munculnya radikalisme. Sedangkan Freud mengemukakan bahwa faktor pendorong radikalisme adalah apa yang disebut dengan *melancholia*, yaitu kejangkelan mendalam yang menyakitkan (*a profoundly painful dejection*). Radikalisme akhirnya menjadi pergulatan antara pengorbanan manusia dengan harapan keduniawian yang didorong magisme atau religiusme. Dengan kata lain

¹¹ Dalam teori dinamika kelompok Ted R. Gurr mengemukakan tentang Teori Deprivasi Relatif dimana seseorang menjadi agresif akibat mengalami deprivasi, kesenjangan antara harapan dengan realita, semakin besar kesenjangan tersebut maka semakin besar kemungkinan terjadi perilaku agresif. Teori Ted R. Gurr menyebutkan deprivasi relatif sebagai faktor penyebab dari pemberontakan atau protes, atau perilaku agresif massal. (Lihat Sarlito Wirawan Sarwono. *Psikologi Sosial: Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan*. Jakarta: Balai Pustaka 2005. Hlm 209-210.)

pengorbanan yang dilakukan oleh manusia yang mengandung unsur kekerasan itu diperintah oleh magis atau agama.¹²

Fenomena pengaruh tiga ideologi global (Neo-Liberalisme, Neo-sosialisme/komunisme, dan Fundamentalisme Islam) sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dalam penciptaan suatu ketidakseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ketidakseimbangan terjadi pada ranah ideologi, sikap dan perilaku warga negara, sampai pada tataran kebijakan publik, ketidakseimbangan tersebut yang kemudian pada akhirnya membuka ruang bagi tindak radikalisme. Ketidakseimbangan berideologi terjadi dimana saat ini Pancasila sudah terlupakan, tidak lagi berada dalam posisi *equilibrium* yang stabil, Pancasila mengalami kegoyahan, sosialisasi Pancasila menjadi minim dan kurangnya campur tangan negara dalam sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Kurangnya campur tangan negara dalam sosialisasi nilai-nilai Pancasila salah satu faktor pendorongnya adalah pengaruh ideologi Neo-Liberalisme yang mereduksi campur tangan negara terhadap pasar serta mengedepankan pola-pola liberalisme yang mengedepankan kebebasan individu, hal tersebut kemudian berimplikasi pada tereduksinya peran negara untuk membina warga negaranya termasuk dalam sosialisasi nilai-nilai Pancasila karena masalah keyakinan berideologi dianggap hak asasi, hanya individu yang berhak menentukan, bukan negara, dan ketika individu tidak tersosialisasi akan nilai Pancasila dengan baik maka nilai-nilai baru akan cepat masuk dan menjadi keyakinan dari individu yang kehilangan pegangan, dan hal ini merupakan celah utama dari masuknya benih-benih radikalisme.

Ketidakseimbangan berideologi tersebut kemudian berimplikasi terhadap sikap dan perilaku sebagai warga negara, maupun sebagai individu. Seseorang dibuat lupa siapa dirinya

¹² Faktor pendorong radikalisme menurut Daniel Bell dan Freud dalam Masyarakat Indonesia Jilid XXXIV, No. 1. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2008.

sebagai warga negara, serta lupa akan tujuan hidupnya. Karena mengalami ketidakseimbangan berideologi dimana Pancasila sudah dilupakan maka seorang warga negara lupa akan hak dan kewajibannya, serta lupa akan tujuan nasionalnya. Ideologi asing kemudian mencoba masuk melalui berbagai sarana dan media mencoba melakukan pengakaran (radikalisasi) di dalam individu dan pada akhirnya terwujud dalam sikap serta perilaku, sehingga individu seakan-akan mempunyai “identitas” baru tidak sebagai warga negara tetapi sebagai penganut ideologi asing yang otomatis mempunyai orientasi dan tujuan yang berbeda dari seorang warga negara Indonesia. Pada tataran ketidakseimbangan sikap dan perilaku inilah tindakan radikalisme dapat meletup sewaktu-waktu, terlebih jika ada motivasi dan faktor pendorong yang kuat baik dari individu maupun lingkungan.

Tekanan ideologi asing terhadap ideologi Pancasila juga menyebabkan ketidakseimbangan pada tataran kebijakan. Intervensi ideologi Neo-Liberalisme menciptakan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada pasar, bukan kepada rakyat, akibatnya kemakmuran berada pada segelintir orang pejabat yang berkoalisi dengan perusahaan asing sebagai investor. Keran pasar bebas dibuka seluas-luasnya dan industri dalam negeri mengalami kelumpuhan, dan berujung pada meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Pengangguran dan kemiskinan inilah yang menjadi makanan empuk bagi ideologi Fundamentalisme Islam untuk memicu tindak radikalisme, aksi teror melibatkan warga negara yang terjepit secara ekonomi, minimnya kesejahteraan, sehingga jarak antara harapan dengan realita seperti yang dikemukakan Teori Deprivasi Relatif Ted R. Gurr dihubungkan lewat jalan mati syahid dan janji-janji surga oleh para *mastermind* tindak radikalisme-terorisme kepada pelaku tindak radikalisme. Mati syahid diyakinkan kepada pelaku teror sebagai realita positif untuk mencapai harapan tunggal umat beragama yang hakiki yaitu

surga. Ajaran agama menjadi amat potensial sebagai sumber tindakan praktis dalam hubungan individu dan kelompok¹³, menurut Smith agama menjadi dasar terbentuknya *religio political system*, Clifford Geertz menyebutnya sebagai *religions mindedness*.¹⁴

Muladi Mughni mengemukakan beberapa faktor pendorong radikalisme agama diantaranya adalah faktor pemikiran, faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial, faktor psikologis dan faktor pendidikan.¹⁵ Faktor pertama yaitu faktor pemikiran, yaitu merebaknya dua trend paham yang ada dalam masyarakat Islam, yang pertama menganggap bahwa agama merupakan penyebab kemunduran ummat Islam. Sehingga jika ummat ingin unggul dalam mengejar ketertinggalannya maka ia harus melepaskan baju agama yang ia miliki saat ini. Pemikiran ini merupakan produk sekularisme yang secara pilosofi anti terhadap agama. Sedang pemikiran yang kedua adalah mereflesikan penentangannya terhadap alam relaitas yang dianggapnya sudah tidak dapat ditolerir lagi, dunia saat ini dipandanganya tidak lagi akan mendatangkan keberkahan dari Allah Swt, penuh dengan kenistaan, sehingga satu-satunya jalan selamat hanyalah kembali kepada agama. Namun jalan menuju kepada agama itu dilakukan dengan cara-cara yang sempit, keras, kaku dan memusuhi segala hal yang berbau modernitas. Pemikiran ini merupakan anak kandung dari pada paham fundamentalisme. Kedua corak pemikiran inilah yang jika tumbuh subur dimasyarakat akan melahirkan tindakan-tindakan radikal-destruktif yang kontra produktif bagi bangsa bahkan agama yang dianutnya.

Faktor kedua adalah faktor ekonomi, Problem kemiskinan, pengangguran dan keterjepitan ekonomi dapat mengubah pola pikir seseorang dari yang sebelumnya baik,

¹³ *Ibid*

¹⁴ Pendapat Smith tentang *religio political system* dan pendapat Geertz tentang *religion mindedness*. *Ibid*

¹⁵ Lihat Ustadz Muladi Mughni, Lc. *Faktor-faktor Penyulut Radikalisme Agama*. www.pesantrenvirtual.com.

menjadi orang yang sangat kejam dan dapat melakukan apa saja, termasuk melakukan terror, William Nock pengarang buku “Perwajahan Dunia Baru” mengatakan: Terorisme yang belakangan ini marak muncul merupakan reaksi dari kesenjangan ekonomi yang terjadi di dunia”. Liberalisme ekonomi yang mengakibatkan perputaran modal hanya bergulir dan dirasakan bagi yang kaya saja, mengakibatkan jurang yang sangat tajam kepada yang miskin. Jika pola ekonomi seperti itu terus berlangsung pada tingkat global, maka yang terjadi reaksinya adalah terorisme internasional. Namun jika pola ekonomi seperti ini diterapkan pada tingkat Negara tertentu, maka akan memicu tindakan terorisme nasional.

Faktor ketiga adalah faktor politik, Stabilitas politik yang diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan bagi rakyat adalah cita-cita semua Negara. Kehadiran para pemimpin yang adil, berpihak pada rakyat, tidak semata hobi bertengkar dan menjamin kebebasan dan hak-hak rakyat, tentu akan melahirkan kebanggaan dari anak negeri untuk selalu membela dan memperjuangkan negaranya. Mereka akan sayang dan menjaga kehormatan negaranya baik dari dalam maupun dari luar. Namun sebaliknya jika politik yang dijalankan adalah politik kotor, politik yang hanya berpihak pada pemilik modal, kekuatan-kekuatan asing, bahkan politik pembodohan rakyat, maka kondisi ini lambat laun akan melahirkan tindakan skeptis masyarakat. Akan mudah muncul kelompok-kelompok atas nama yang berbeda baik politik, agama ataupun sosial yang mudah saling menghancurkan satu sama lainnya.

Faktor keempat adalah faktor sosial. Diantara faktor munculnya pemahaman yang menyimpang adalah adanya kondisi konflik yang sering terjadi di dalam masyarakat. Banyaknya perkara-perkara yang menyedot perhatian massa yang berujung pada tindakan-tindakan anarkis, pada akhirnya melahirkan antipati sekelompok orang untuk bersikap

bercerai dengan masyarakat. Pada awalnya sikap berpisah dengan masyarakat ini diniatkan untuk menghindari kekacauan yang terjadi. Namun lama kelamaan sikap ini berubah menjadi sikap antipati dan memusuhi masyarakat itu sendiri. Jika sekelompok orang ini berkumpul menjadi satu atau sengaja dikumpulkan, maka akan sangat mudah dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Dalam gerakan agama sempalan, biasanya mereka lebih memilih menjadikan pandangan tokoh atau ulama yang keras dan kritis terhadap pemerintah. Karena mereka beranggapan, kelompok ulama yang memiliki pandangan moderat telah terkooptasi dan bersekongkol dengan penguasa. Sehingga ajaran Islam yang moderat dan rahmatan lil alamin itu tidak mereka ambil bahkan dijauhkan dan mereka lebih memilih pemahaman yang keras dari ulama yang yang kritis tersebut. Dari sinilah lalu, maka pemikiran garis keras Islam sesungguhnya sangat kecil, dan tidak mencerminkan wajah Islam yang sebenarnya. Namun gerakan dan tindakannya yang nekat dan tidak terkontrol, menjadikan wajah Islam yang moderat dan mayoriats itu seolah tertutup dan hilang.

Faktor kelima adalah faktor psikologis. Pengalamannya dengan kepahitan hidupnya, lingkungannya, kegagalan dalam karir dan kerjanya, dapat saja mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dan anarkis. Perasaan yang menggunung akibat kegagalan hidup yang dideranya, mengakibatkan perasaan diri terisolasi dari masyarakat. Jika hal ini terus berlangsung tanpa adanya pembinaan dan bimbingan yang tepat. Orang tersebut akan melakukan perbuatan yang mengejutkan sebagai reaksi untuk sekedar menampakkan eksistensi dirinya. Dr. Abdurrahman al-Mathrudi pernah menulis, bahwa sebagian besar orang yang bergabung kepada kelompok garis keras adalah mereka yang secara pribadi mengalami kegagalan dalam hidup dan pendidikannya. Mereka inilah yang harus kita bina, dan kita perhatikan. Maka hendaknya kita tidak selalu meremehkan

mereka yang secara ekonomi dan nasib kurang beruntung. Sebab mereka ini sangat rentan dimanfaatkan dan dibrain washing oleh kelompok yang memiliki target terorisme tertentu.

Faktor keenam adalah faktor pendidikan. Sekalipun pendidikan bukanlah faktor langsung yang dapat menyebabkan munculnya gerakan terorisme, akan tetapi dampak yang dihasilkan dari suatu pendidikan yang keliru juga sangat berbahaya. Pendidikan agama khususnya yang harus lebih diperhatikan. Ajaran agama yang mengajarkan toleransi, kesantunan, keramahan, membenci pengrusakan, dan menganjurkan persatuan tidak sering didengungkan. Retorika pendidikan yang disuguhkan kepada ummat lebih sering bernada mengejek daripada mengajak, lebih sering memukul daripada merangkul, lebih sering menghardik daripada mendidik. Maka lahirnya generasi umat yang merasa dirinya dan kelompoknyalah yang paling benar sementara yang lain salah maka harus diperangi, adalah akibat dari sistem pendidikan kita yang salah. Sekolah-sekolah agama dipaksa untuk memasukkan kurikulum-kurikulum umum, sememntara sekolah umum alergi memasukan kurikulum agama, dan tidak sedikit orang-orang yang terlibat dalam aksi terorisme justru dari kalangan yang berlatar pendidikan umum, seperti dokter, insinyur, ahli teknik, ahli sains, namun hanya mempelajari agama sedikit dari luar sekolah, yang kebenaran pemahamannya belum tentu dapat dipertanggungjawabkan. Atau dididik oleh kelompok Islam yang keras dan memiliki pemahaman agama yang serabutan.¹⁶

c. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam mencegah berkembangnya tindak radikalisme di era reformasi.

¹⁶ *Ibid*

Dalam mencegah berkembangnya tindakan radikalisme diperlukan upaya-upaya yang menyentuh semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, radikalisme bukan lagi persoalan lokal melainkan permasalahan nasional dan internasional. Di era reformasi, nilai-nilai Pancasila yang mulai ditinggalkan masyarakat perlu direvitalisasi, sedangkan segala bentuk radikalisme sendiri harus dederadikalisasi. Dederadikalisasi yang paling utama dapat dilakukan adalah melalui implementasi nilai-nilai Pancasila secara utuh, mulai dari tahap sosialisasi, pemahaman, implementasi sampai ke aktualisasi Pancasila. Dengan adanya pemahaman, penghayatan, implementasi sampai aktualisasi Pancasila maka radikalisme agama akan tercerabut dari akarnya, karena radikalisme bukan nilai-nilai asli yang berasal dari *cultural process* masyarakat Indonesia.

Radikalisme merupakan bentuk implantasi ajaran-ajaran Timur Tengah sebagai reaksi atas hegemoni Liberalisme Amerika Serikat. Menurut Rektor Universitas Pancasila Edie Toet Hendratno solusi penanganan masalah radikalisme adalah menjalankan nilai-nilai Pancasila.¹⁷ Upaya dederadikalisasi juga harus dilakukan oleh seluruh komponen bangsa, Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono mengemukakan bahwa mencegah warga negara Indonesia dari melakukan tindakan yang menyimpang dari ajaran agama apalagi hukum adalah tanggung jawab semua pihak.¹⁸

Upaya dederadikalisasi melalui implementasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan melalui metode *bottom-up* dengan menggali serta membangkitkan kembali nilai kearifan lokal yang selaras dengan Pancasila (dederadikalisasi induktif) maupun dilakukan melalui metode *top-down* dengan negara sebagai aktor utama pendorong sosialisasi nilai-nilai Pancasila dengan menyediakan seperangkat aturan perundang-undangan yang mengikat, penciptaan

¹⁷ Edie Toet Hendratmo dalam *Pancasila Bisa Redam Radikalisme*. Media Indonesia Rabu, 28 September 2011.

¹⁸ <http://www.antarane.ws.com/berita/263442/presiden-deradikalisasi-tanggung-jawab-bersama>

kesejahteraan masyarakat yang merata, serta turut memberikan dorongan motivasi kepada warga negara untuk selalu memelihara sikap kerukunan serta gotong royong dalam proses pencapaian tujuan nasional (deradikalisasi deduktif). Resultante dari dua metode deradikalisasi tersebut dapat secara efektif mencegah berkembangnya tindakan radikalisme karena selain didukung oleh revitalisasi nilai-nilai yang ada dari kearifan lokal juga didukung oleh negara sebagai aktor utama yang memberikan payung politik dalam implementasi nilai-nilai Pancasila.

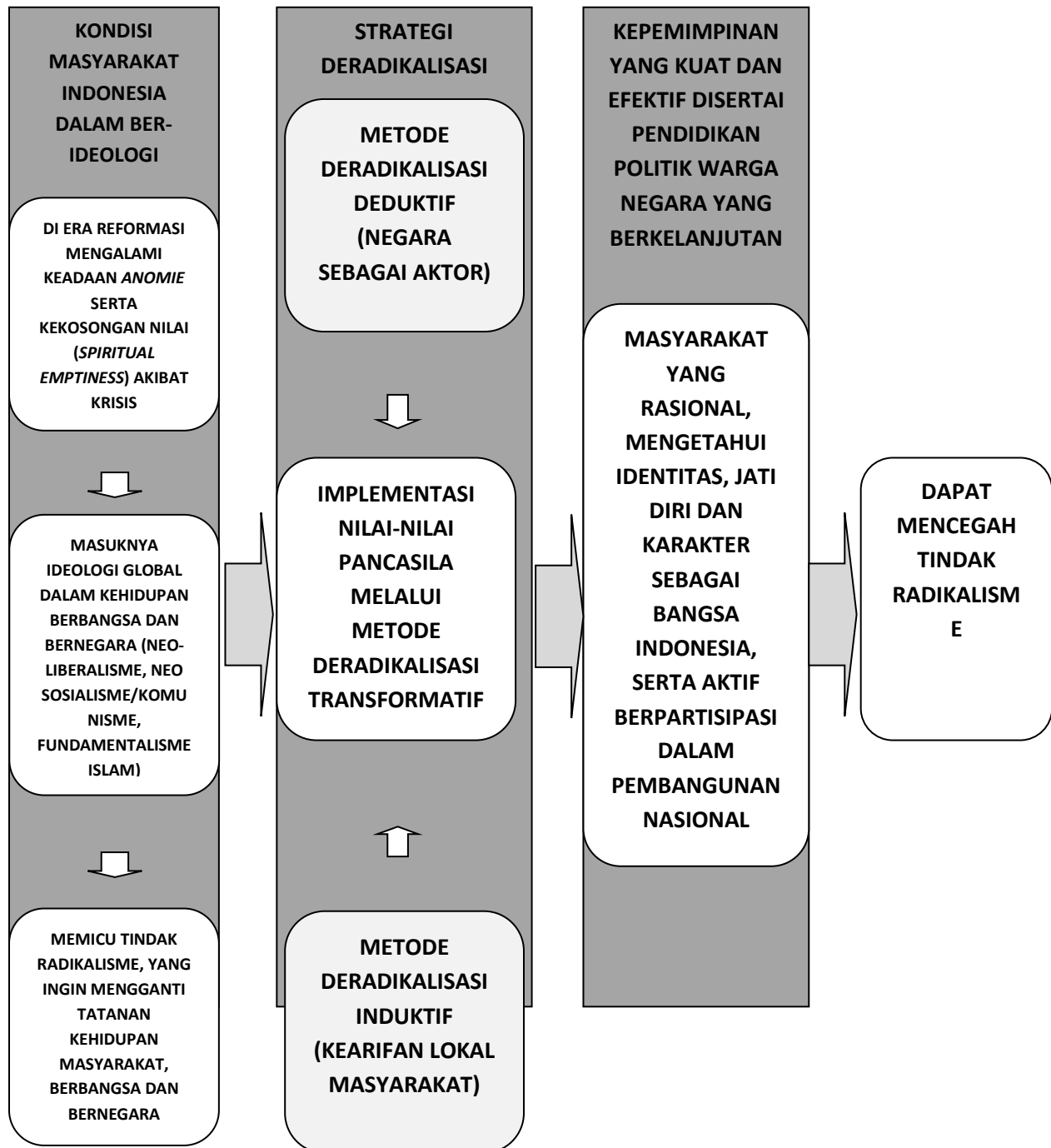
Hasil yang diharapkan dari sinergi kedua metode tersebut adalah meningkatnya daya tahan ideologi Pancasila dalam menghadapi ancaman ideologi global, khususnya ideologi yang mendorong tindak radikalisme, serta mendorong negara dan masyarakat untuk mampu mencegah aksi-aksi radikal melalui implementasi nilai-nilai Pancasila (deradikalisasi transformatif). Selama ini metode deradikalisasi hanya berupa metode “pengalihan sementara” perhatian masyarakat korban radikalisme maupun pelaku radikalisme agama dengan kegiatan-kegiatan positif yang sifatnya hanya di tataran perilaku saja, sedangkan benih-benih radikalisme sudah tertanam di hati korban/pelaku radikalisme agama, berada di tataran *norms* dan *value* individu.

Metode deradikalisasi berupa “pengalihan sementara” tersebut pada kenyataannya tidak efektif dalam meredam tindak radikalisme, serangkaian teror dan tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama masih sering terjadi. Oleh sebab itu pengintegrasian implementasi nilai-nilai Pancasila ke dalam metode deradikalisasi menjadi sangat penting, karena akan menyentuh tataran *value*, *norms* sampai *behaviour* suatu individu yang kemudian akan memberikan *multiplier effect* berupa terwujudnya masyarakat yang aman, tenteram dan damai.

Metode deradikalisasi transformatif dengan implementasi nilai-nilai Pancasila berusaha menciptakan *output* yaitu masyarakat yang mengetahui jati diri dan karakternya sebagai bangsa Indonesia, memegang teguh ideologi Pancasila sebagai *living ideology* serta *working ideology*, sehingga menjadi masyarakat yang rasional dalam menghadapi segala tantangan perubahan zaman. Ideologi radikal yang terjadi seperti sekarang ini membuat masyarakat “putus asa” dan tidak rasional dalam menyikapi perkembangan zaman, semakin ketatnya kompetisi antar individu, kelompok maupun bangsa disikapi dengan cara-cara destruktif dan kontra produktif, sehingga bukan lagi kompetisi yang sehat untuk memenangkan pengaruh global, melainkan kompetisi yang tidak seimbang dengan menciptakan kondisi anarki yang kemudian diisi dengan nilai-nilai radikal.

Peran kepemimpinan yang kuat dan efektif serta pendidikan politik yang berkelanjutan yang pada akhirnya menentukan keberhasilan implementasi nilai-nilai Pancasila di Era Reformasi dalam mencegah berkembangnya tindak radikalisme. Kepemimpinan yang kuat dan efektif bersendikan Pancasila memberikan simbol teladan sekaligus ujung tombak pengambilan keputusan yang menjadi *spirit* rakyat Indonesia dalam menghadapi tantangan di era reformasi. Dengan ditopang pendidikan politik yang berkelanjutan diharapkan dapat terbentuk suatu budaya politik masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara untuk mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila, sehingga tercipta karakter masyarakat berwawasan kebangsaan yang membangun, demokratis, dan jauh dari tindak radikalisme yang destruktif.

d. Alur Pikir Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Era Reformasi dalam Mencegah Berkembangnya Tindak Radikalisme



PENUTUP

a. Kesimpulan

- 1) Implementasi nilai-nilai Pancasila di era reformasi tidak dilakukan secara efektif, bahkan nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara semakin memudar, akibat adanya situasi perubahan sosial yang ditandai dengan gejala *anomie* sehingga masyarakat seperti kehilangan nilai, arah dan tujuan untuk bersikap dan berperilaku. Kondisi tersebut menjadi momentum bagi ideologi global untuk menancapkan pengaruhnya di Indonesia sehingga membuka ruang bebas bagi munculnya tindak radikalisme.
- 2) Tindak radikalisme merupakan ancaman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena bersifat destruktif sehingga dapat menghambat proses pencapaian tujuan nasional. Oleh karena itu implementasi nilai-nilai Pancasila perlu dikonkritkan melalui metode deradikalisasi transformatif, yaitu dengan memadukan revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat dengan peran negara sebagai aktor dalam sosialisasi nilai-nilai Pancasila, sekaligus memberi payung hukum dan kebijakan dalam mendukung terwujudnya tujuan nasional yang sesuai dengan Pancasila.
- 3) Dengan implementasi nilai-nilai Pancasila melalui metode deradikalisasi transformatif, ditopang oleh kepemimpinan yang kuat dan efektif, disertai pendidikan politik warga negara yang berkelanjutan, diharapkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang rasional, mampu mengenal identitas, jati diri dan karakter sebagai bangsa Indonesia sehingga terbentuk karakter masyarakat yang membangun, jauh dari tindak radikalisme yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Saran

- 1) Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam mencegah tindak radikalisme harus dilakukan dengan *political will* yang kuat dari seluruh komponen bangsa, agar tercapai hasil yang efektif dan berkelanjutan.
- 2) Strategi deradikalisasi harus dilakukan dalam kerangka *rule of law*, sehingga tidak terjadi penyimpangan yang dapat melanggar nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Drs. A. Rubaidi, M.Ag. *Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama dan Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*. Penerbit Logung Pustaka bekerjasama dengan LTNU PWNU Jawa Timur. Yogyakarta: 2008

Masyarakat Indonesia Jilid XXXIV, No. 1. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2008.

Sarlito Wirawan Sarwono. *Psikologi Sosial: Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan*. Jakarta: Balai Pustaka 2005.

TAP MPR-RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.

Ustadz Muladi Mughni, Lc. *Faktor-faktor Penyulut Radikalisme Agama*.
www.pesantrenvirtual.com.

Pancasila Bisa Redam Radikalisme. Media Indonesia Rabu, 28 September 2011.

<http://www.antarane.ws.com/berita/263442/presiden-deradikalisasi-tanggung-jawab-bersama>

<http://www.cmm.or.id/>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Anomie>